

STRATEGI ADVOKASI TENAGANITA TERHADAP SIME DARBY PLANTATION DI MALAYSIA TAHUN 2020–2023

Mumtaz Najih Fauzan¹, Fadhlan Nur Hakiem²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

e-mail: ¹2210631260039@student.unsika.ac.id, ²Fadhlan.nur@fisip.unsika.ac.id

Abstract: *This study examines how Tenaganita, a Malaysian local non-governmental organisation, deployed transnational advocacy network (TAN) strategies to compel the United States Customs and Border Protection (CBP) to issue a Withhold Release Order (WRO) against Sime Darby Plantation, the world's largest producer of certified sustainable palm oil, between 2020 and 2023. Using a qualitative descriptive design based on documentary study, the research applies Keck and Sikkink's framework of information, symbolic, leverage, and accountability politics, together with the boomerang pattern. The findings show that the forced-labour conditions at Sime Darby satisfied all eleven indicators defined by the International Labour Organization, while domestic enforcement and voluntary RSPO certification both failed. Tenaganita gathered grassroots evidence, transferred it to the Hong Kong-based NGO Liberty Shared for translation into a regulatory petition, and amplified it through investigative journalism that reframed a technical compliance issue as a global moral controversy. The integration of the four strategies converted moral pressure into a coercive sanction, culminating in roughly RM82 million in recruitment-fee reimbursement to more than 34,000 workers before the WRO was revoked in February 2023.*

Keywords: *accountability politics; boomerang pattern; forced labour; transnational advocacy networks; withhold release order.*

Abstrak: Studi ini mengkaji bagaimana Tenaganita, sebuah organisasi non-pemerintah lokal Malaysia, menerapkan strategi jaringan advokasi transnasional (TANs) untuk mendorong United States Customs and Border Protection (CBP) menerbitkan Withhold Release Order (WRO) terhadap Sime Darby Plantation, produsen minyak sawit berkelanjutan bersertifikat terbesar di dunia, pada 2020–2023. Dengan pendekatan kualitatif berdesain deskriptif berbasis studi dokumentasi, penelitian ini menerapkan kerangka Keck dan Sikkink tentang politik informasi, simbolis, leverage, dan akuntabilitas, beserta pola bumerang. Temuan menunjukkan bahwa kondisi kerja paksa di Sime Darby memenuhi seluruh sebelas indikator yang ditetapkan Organisasi Buruh Internasional, sementara penegakan hukum domestik dan sertifikasi sukarela RSPO sama-sama gagal. Tenaganita mengumpulkan bukti akar rumput, mentransferkannya kepada LSM berbasis Hong Kong, Liberty Shared, untuk diterjemahkan menjadi petisi regulatif, dan memperbesarnya melalui jurnalisme investigatif yang membingkai ulang persoalan kepatuhan teknis menjadi kontroversi moral global. Integrasi keempat strategi tersebut mengonversi tekanan moral menjadi sanksi koersif, yang berpuncak pada pengembalian biaya perekrutan sekitar RM82 juta kepada lebih dari 34.000 pekerja sebelum WRO dicabut pada Februari 2023.

Kata kunci: kerja paksa; politik akuntabilitas; pola bumerang; jaringan advokasi transnasional; withhold release order.

PENDAHULUAN

Perdagangan global semakin

menempatkan hak asasi manusia dan kerja layak sebagai komponen integral dari tata kelola rantai pasok internasional.

Rantai pasok komoditas ekspor kini tidak hanya disoroti dari dampak lingkungannya, tetapi juga dari potensinya menjadi lokus eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan kondisi kerja yang buruk. Sektor kelapa sawit termasuk yang paling sering dikritik karena struktur produksinya yang padat karya dan ketergantungannya pada pekerja migran yang sangat rentan terhadap eksploitasi (Ahmad et al., 2023). Sebagai salah satu komoditas pertanian paling strategis di dunia, kelapa sawit menopang perekonomian utama di Asia Tenggara sekaligus pasar konsumen global, sehingga memperbesar sorotan terhadap jejak sosial dan lingkungannya (WWF, 2024).

Industri kelapa sawit menempati posisi sentral dalam perekonomian Malaysia, menyumbang sekitar 39 persen produksi minyak sawit global dan 44 persen ekspor global. Di balik kontribusi ekonomi tersebut, sektor ini bergantung pada pekerja migran yang mencakup sekitar 80 persen tenaga kerja perkebunan, terutama berasal dari Indonesia, India, Nepal, dan Bangladesh. Kerentanan para pekerja ini bersumber dari kombinasi biaya perekrutan yang sangat tinggi, penahanan paspor, dan ketergantungan status keimigrasian mereka pada majikan, yang membuat mereka takut melaporkan pelanggaran karena khawatir dideportasi (Deli et al., 2023; Wong, 2025).

Ironisnya, pelanggaran semacam itu juga ditemukan pada perkebunan yang telah mengantongi sertifikasi keberlanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Fenomena ini memunculkan apa yang disebut jebakan sertifikasi (certification trap), yaitu situasi ketika label keberlanjutan memberikan rasa aman semu kepada pembeli sembari menyembunyikan pelanggaran yang sesungguhnya terjadi (Walhi, 2024). Sejalan dengan meningkatnya perhatian global, negara-negara pengimpor mulai menerapkan instrumen hukum perdagangan berbasis hak asasi manusia. Amerika Serikat,

melalui Section 307 Tariff Act 1930, mengembangkan mekanisme Withhold Release Order (WRO), yakni perintah kepabeanan untuk menahan impor yang diduga diproduksi dengan kerja paksa (Nissen, 2022).

Pada Desember 2020, raksasa kelapa sawit Sime Darby Plantation produsen Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) terbesar di dunia dikenai WRO oleh CBP atas dugaan kerja paksa (CBP, 2025). Sanksi tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi advokasi yang sistematis. Dalam kasus ini, Tenaganita, sebuah LSM lokal Malaysia yang didirikan pada 1991, berperan sebagai aktor inti yang membangun basis data empiris yang menjadi “amunisi” bagi kampanye global. Data tersebut disalurkan melalui Liberty Shared, sebuah LSM yang berbasis di Hong Kong, yang mengajukan petisi resmi kepada CBP hingga akhirnya memicu sanksi (Tenaganita, 2022).

Banyak gerakan masyarakat sipil berupaya menekan perusahaan kelapa sawit terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia, tetapi kerap gagal menghasilkan sanksi hukum yang mengikat. Tekanan terhadap Wilmar, misalnya, hanya menghasilkan komitmen sukarela tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Sebaliknya, Tenaganita berhasil mendorong pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi perdagangan konkret terhadap raksasa kelapa sawit. Justru keberhasilan langka inilah yang menjadikan strategi Tenaganita penting untuk dikaji sebagai praktik keberhasilan gerakan advokasi transnasional.

Kasus Sime Darby secara analitis signifikan karena menggambarkan bagaimana instrumen perdagangan ekstrateritorial dapat berhasil ketika diplomasi hak asasi manusia konvensional menemui jalan buntu. Section 307 Tariff Act 1930 yang lama tidak aktif kembali dihidupkan secara substansial oleh Trade Facilitation and Trade Enforcement Act 2015, yang menghapus apa yang disebut celah *consumptive-demand* yang sebelumnya

membolehkan barang hasil kerja paksa masuk ke Amerika Serikat ketika pasokan domestik tidak mencukupi. Perubahan undang-undang ini mengubah Withhold Release Order dari ketentuan yang jarang dipakai menjadi instrumen penegakan berbasis pasar yang kuat dan dapat dimobilisasi secara sengaja oleh aktor masyarakat sipil (Nissen, 2022). Bagi sebuah LSM Malaysia yang beroperasi dalam konteks lemahnya penegakan standar kerja paksa dan nyaris tiadanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses, peluang memicu sanksi mengikat di pasar konsumen terbesar dunia merupakan titik tekan yang sangat menarik, dan logika penargetan inilah yang menjadikan kasus ini ujian yang mengungkap bagi teori advokasi transnasional.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji advokasi dan ketenagakerjaan di industri kelapa sawit, namun masih menyisakan celah. Anwar (2025) menerapkan kerangka TANs pada advokasi kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, menunjukkan relevansi pendekatan jaringan tetapi berfokus pada isu lingkungan alih-alih ketenagakerjaan. Setiawan et al. (2022) menyajikan analisis komparatif perkebunan rakyat Indonesia dan Malaysia tanpa menyentuh advokasi transnasional. Somiah et al. (2025) menyoroti eksploitasi pekerja migran di Sarawak dari perspektif mikro-sosiologis, sementara Brad dan Hein (2022) menekankan konflik agraria dan kritik terhadap RSPO. Dengan demikian, studi yang secara khusus menganalisis strategi TANs Tenaganita dalam mendorong sanksi WRO terhadap perusahaan kelapa sawit masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana strategi advokasi Tenaganita dalam Transnational Advocacy Networks mendorong diterbitkannya sanksi Withhold Release Order terhadap Sime Darby Plantation pada 2020–2023? Studi ini menggunakan teori Transnational Advocacy Networks (TANs) dari

Margaret Keck dan Kathryn Sikkink sebagai kerangka analisis (Keck & Sikkink, 1998). Kerangka ini berada dalam tradisi kajian Hubungan Internasional yang lebih luas yang mengakui meningkatnya peran aktor non-negara berdampingan dengan negara dalam politik dunia (Burchill et al., 2005; Theys, 2017; Wicaksana, 2016). Keck dan Sikkink mendefinisikan TANs sebagai jaringan aktor yang bekerja secara internasional atas suatu isu, diikat oleh nilai bersama, pertukaran informasi, dan tujuan mendorong perubahan kebijakan, yang beroperasi melalui empat strategi: politik informasi, politik simbolis, politik leverage, dan politik akuntabilitas. Konsep inti pelengkapannya adalah pola bumerang (boomerang pattern), yakni ketika LSM lokal yang terhambat di tingkat domestik “melemparkan” isu ke arena internasional sehingga tekanan memantul kembali kepada target dari luar (Keck & Sikkink, 1998).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis strategi TANs Tenaganita dalam mendorong sanksi WRO terhadap Sime Darby Plantation pada 2020–2023. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang proses terbangunnya tekanan internasional dan respons kebijakan Amerika Serikat dalam konteks kerja paksa di industri kelapa sawit.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Data primer meliputi dokumen kebijakan CBP tentang penerbitan dan pencabutan WRO, laporan investigasi dan siaran pers Tenaganita, petisi yang diajukan kepada CBP, serta laporan keberlanjutan perusahaan. Data sekunder meliputi pemberitaan media dan lembaga kredibel, beserta literatur akademik yang relevan. Dokumen dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi

terhadap indikator strategi TANs, dan keterkaitannya dengan periode 2020–2023.

Analisis data mengikuti tahapan analisis kualitatif Creswell (2014): mengorganisasi data, membaca keseluruhan materi, melakukan pengodean (coding), serta mengembangkan deskripsi dan tema. Pengodean diarahkan pada empat kategori strategi TANs politik informasi, simbolis, leverage, dan akuntabilitas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan laporan advokasi LSM, dokumen hukum CBP, dan klarifikasi perusahaan, sehingga konsistensi fakta antarsumber dapat diverifikasi.

Untuk mengoperasionalkan kerangka analisis, masing-masing dari empat strategi TANs diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diamati untuk memandu proses pengodean. Politik informasi ditelusuri melalui produksi dan transfer lintas batas atas kesaksian, petisi, dan dokumentasi investigatif; politik simbolis melalui perangkat pembingkai (framing) dan narasi moral yang digunakan dalam media dan laporan LSM; politik leverage melalui identifikasi titik tekan material atau kelembagaan, khususnya pasar impor Amerika Serikat; dan politik akuntabilitas melalui tuntutan terdokumentasi atas tanggung jawab korporasi beserta hasil terukurnya. Bukti kemudian disusun secara kronologis sehingga rangkaian kausal yang menghubungkan dokumentasi akar rumput dengan penerbitan dan pencabutan WRO dapat direkonstruksi dan dinilai terhadap model bumerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kerja Paksa dan Kegagalan Ganda Mekanisme Domestik

Kerentanan pekerja migran di perkebunan Malaysia bersifat struktural, bukan insidental. Biaya perekrutan dapat menumpuk hingga sekitar RM10.000 per pekerja, memaksa mereka masuk ke

dalam relasi utang sejak hari pertama bekerja, yang diperkuat oleh penahanan paspor dan ketergantungan status keimigrasian pada perusahaan. Pandemi Covid-19 memperdalam kerentanan ini, karena pembatasan mobilitas membuat pekerja semakin terkurung di barak mereka (Amnesty International, 2021; Somiah et al., 2025).

Kasus Sime Darby menyingkap kegagalan ganda di tingkat domestik. Pertama, penegakan hukum ketenagakerjaan Malaysia tidak efektif karena adanya konflik kepentingan struktural antara kepentingan ekonomi industri kelapa sawit dan kewajiban melindungi pekerja; saluran pengaduan formal kerap tidak menghasilkan tindak lanjut yang berarti (Deli et al., 2023). Kedua, skema sertifikasi sukarela RSPO gagal mendeteksi pelanggaran, padahal seluruh operasi Sime Darby di Malaysia telah 100 persen tersertifikasi sejak 2014. Tersumbatnya saluran domestik inilah yang secara teoretis menjadi prasyarat aktifnya pola bumerang (Keck & Sikkink, 1998).

Kegagalan ganda ini diperparah oleh keterbatasan mandat lembaga pengawas nasional. Lembaga pengawas nasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) mendokumentasikan pelanggaran berulang di perkebunan, tetapi rekomendasinya bersifat anjuran dan tidak mengikat, sehingga tidak mampu memaksa majikan maupun aparat penegak untuk bertindak (Wong, 2025). Inspeksi ketenagakerjaan, jika pun terjadi, jarang dilakukan, kerap diberitahukan terlebih dahulu, dan jarang menjangkau barak perkebunan terpencil tempat pelanggaran paling serius berlangsung. Para pekerja migran sendiri menghadapi hambatan besar untuk memperoleh keadilan: kesulitan bahasa, dokumen identitas yang disita, ketakutan akan penahanan imigrasi, dan ketergantungan pada hunian yang dikendalikan majikan, semuanya menghalangi pengaduan. Akibat kumulatifnya adalah sistem impunitas struktural ketika bukti

pelanggaran yang kredibel tersedia tetapi tidak ada institusi domestik yang memiliki sekaligus kemauan dan kewenangan untuk mengubah bukti itu menjadi konsekuensi persis kondisi yang menurut model bumerang akan mendorong aktor yang dirugikan mencari sekutu eksternal.

Pemetaan Aktor dalam Jaringan Advokasi Transnasional

Sanksi WRO terhadap Sime Darby tidak dapat dipahami sebagai kerja satu aktor tunggal; melainkan merupakan produk dari rangkaian jaringan yang mengubah kesaksian pekerja akar rumput menjadi instrumen sanksi perdagangan lintas batas. Jaringan ini melibatkan lima simpul aktor yang saling bergantung: pekerja migran sebagai sumber kesaksian, Tenaganita sebagai pengumpul dan pemvalidasi data primer, Liberty Shared sebagai penerjemah bukti ke dalam bahasa hukum, CBP sebagai otoritas penegak, dan Sime Darby Plantation sebagai korporasi target. Liberty Shared memainkan peran krusial karena kesaksian pekerja, sekuat apa pun secara moral, tidak otomatis memiliki kekuatan hukum kecuali diterjemahkan ke dalam kerangka regulasi yang relevan, yaitu Section 307 Tariff Act 1930, yang celah *consumptive-demand*-nya baru ditutup melalui Trade Facilitation and Trade Enforcement Act 2015 (Nissen, 2022).

Kronologi Kasus WRO Sime Darby Plantation (2020–2023)

Kasus ini berlangsung dalam empat fase, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini. Pada April 2020, Liberty Shared mengajukan petisi setebal lima puluh halaman yang disertai lebih dari enam puluh dokumen pendukung kepada CBP, berdasarkan terpenuhinya sebelas indikator kerja paksa ILO. Petisi itu diperkuat oleh laporan investigatif berjudul “Fruits of Labor” pada September 2020. Pada 30 Desember 2020, CBP menerbitkan WRO yang mencakup seluruh produk kelapa sawit Sime Darby. Upaya perusahaan

menempuh gugatan *discovery* (SLAPP) terhadap Duncan Jepson justru menjadi bumerang, dan pada Januari 2022 CBP meningkatkan sanksi menjadi Notice of Finding. Tekanan ini memaksa Sime Darby menunjuk auditor independen dan membayar remediasi biaya perekrutan, hingga sanksi dicabut pada Februari 2023 (Nissen, 2022; Tenaganita, 2022).

Fase pertama, yang berlangsung pada bulan-bulan awal 2020, merupakan fondasi pembuktian bagi keseluruhan kampanye. Tenaganita, berbekal tiga dekade keterlibatan akar rumput dengan komunitas migran di Semenanjung Malaysia, secara sistematis mengumpulkan kesaksian langsung pekerja yang mendokumentasikan penyitaan paspor, utang perekrutan yang kerap melampaui RM10.000, potongan upah yang menyesatkan, serta kondisi barak yang buruk di perkebunan Sime Darby. Karena organisasi masyarakat sipil Malaysia tidak dapat memicu tindakan kepabeanan Amerika Serikat sendirian, Tenaganita mentransfer dokumentasi ini kepada Liberty Shared, LSM advokasi hukum berbasis di Hong Kong yang memiliki kapasitas teknis untuk mengubah bukti lapangan menjadi pengajuan regulatif. Pada April 2020, Liberty Shared mengajukan petisi setebal lima puluh halaman dengan lebih dari enam puluh dokumen lampiran kepada CBP, dengan argumen bahwa kelapa sawit Sime Darby diproduksi dengan kerja paksa sebagaimana didefinisikan dalam Section 307 Tariff Act 1930. Yang krusial, petisi itu disusun berdasarkan sebelas indikator kerja paksa ILO, sehingga CBP dapat menilai tuduhan terhadap tolok ukur hukum yang diakui secara internasional, bukan sekadar pengaduan anekdotal. Fase ini mencontohkan apa yang oleh Keck dan Sikkink disebut politik informasi: produksi strategis dan pergerakan lintas batas atas informasi yang kredibel dan dapat digunakan. Fase ini juga menandai “lemparan” pertama bumerang, ketika aktor lokal yang terhambat secara domestik menyalurkan keluhannya

melalui mitra transnasional menuju institusi eksternal yang kuat yang mampu menjatuhkan konsekuensi yang gagal diberikan oleh mekanisme Malaysia (Tenaganita, 2022).

Fase kedua, dari September hingga Desember 2020, mengubah bukti terdokumentasi menjadi tekanan publik dan regulatif yang berkelanjutan. Pada 24 September 2020, laporan investigatif “Fruits of Labor” mengaitkan pelanggaran di perkebunan kelapa sawit Malaysiatermasuk milik Sime Darbydengan rantai pasok merek konsumen ternama dunia dan institusi keuangan besar. Dengan menyebut penerima manfaat di hilir, laporan itu menjalankan strategi naming-and-shaming klasik yang membingkai ulang persoalan kepatuhan ketenagakerjaan yang teknis menjadi kontroversi moral yang melibatkan konsumen biasa. Amplifikasi ini penting karena meningkatkan taruhan reputasional dan komersial bagi pembeli dan investor, mempersempit ruang politik bagi CBP untuk menolak bertindak. Pada 30 Desember 2020, CBP menerbitkan Withhold Release Order terhadap produk kelapa sawit dan turunannya yang dapat ditelusuri ke Sime Darby Plantation dan anak-anak perusahaannya, dengan memerintahkan pelabuhan masuk untuk menahan kiriman tersebut. Pengaturan waktunya signifikan: perintah terhadap Sime Darby menyusul tindakan CBP sebelumnya pada 2020 terhadap produsen Malaysia lain, termasuk Top Glove dan FGV Holdings, yang menandakan postur penegakan yang lebih luas terhadap kerja paksa dalam rantai pasok Malaysia. Bagi jaringan advokasi, WRO merepresentasikan konversi tekanan moral dan informasional menjadi tindakan administratif yang mengikat dengan konsekuensi finansial langsung (CBP, 2025; Nissen, 2022).

Fase ketiga, yang membentang sepanjang 2021 hingga awal Januari 2022, ditandai oleh resistensi korporasi yang pada akhirnya kontraproduktif. Alih-alih bergerak cepat melakukan remediasi,

Sime Darby menempuh tindakan discovery yang secara luas dicirikan sebagai gugatan strategis untuk membungkam partisipasi publik (SLAPP), dengan tujuan memaksa Liberty Shared dan direkturnya, Duncan Jepson, mengungkap sumber yang melandasi petisi. Manuver itu menjadi bumerang: ia justru menarik sorotan lebih jauh, memperkuat persepsi bahwa perusahaan berupaya membungkam para penuduhnya alih-alih menangani pelanggaran yang mendasarinya, dan turut mendorong mundurnya para penasihat hak asasi manusia yang terkait dengan pengaturan pengawasan perusahaan. Litigasi itu tidak menggoyahkan dasar pembuktian petisi maupun memulihkan kepercayaan pasar. Pada 28 Januari 2022, CBP meningkatkan tindakan dengan menerbitkan Notice of Finding, yang dimuat dalam Federal Register, yang secara formal menetapkan bahwa kelapa sawit Sime Darby diproduksi dengan kerja paksa. Jika Withhold Release Order hanya menahan barang yang dicurigai sambil menunggu informasi lebih lanjut, Notice of Finding memberi wewenang penyitaan dan perampasan barang, sehingga perusahaan terancam kehilangan kargo secara permanen dan menghadapi risiko hukum yang meningkat di Amerika Serikat. Eskalasi ini menunjukkan daya tahan leverage jaringan dan menggeser kalkulasi untung-rugi secara tegas melawan resistensi yang berkelanjutan (CBP, 2025; Nissen, 2022).

Fase keempat dan terakhir, dari Februari 2022 hingga Februari 2023, berpusat pada remediasi terverifikasi dan akhirnya modifikasi sanksi. Di bawah tekanan komersial dan hukum yang meningkat, Sime Darby menggandeng konsultan independen untuk melakukan penilaian pihak ketiga atas praktik ketenagakerjaan di seluruh operasinya dan mengawasi pengembalian biaya perekrutan sesuai prinsip “Employer Pays” yang selaras dengan ILO. Sepanjang proses ini perusahaan melaporkan pengembalian sekitar RM82 juta biaya terkait perekrutan kepada lebih

dari 34.000 pekerja migran yang masih bekerja maupun yang telah berhenti, disertai komitmen merevisi prosedur perekrutan, penyimpanan dokumen, dan pengaduan. Pada 3 Februari 2023, CBP memodifikasi temuannya dan mengumumkan bahwa produk kelapa sawit Sime Darby kembali dapat diterima di pelabuhan Amerika Serikat, dengan merujuk bukti bahwa perusahaan telah menangani indikator kerja paksa yang diidentifikasi dalam petisi awal. Secara analitis, hasil ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pembenaran bagi korporasi melainkan sebagai ekspresi paling konkret dari politik akuntabilitas dalam kasus ini: sebuah perusahaan multinasional yang kuat dipaksa meremediasi kerugian yang sebelumnya disangkalnya, di bawah pengawasan eksternal dan ancaman pengucilan pasar yang berkelanjutan (CBP, 2025; Tenaganita, 2022). Pencabutan itu dengan demikian menutup lingkaran bumerang, menunjukkan bahwa advokasi transnasional, ketika memadukan strategi informasi, simbolis, leverage, dan akuntabilitas, dapat menghasilkan perubahan terukur dalam perilaku korporasi yang gagal dicapai oleh mekanisme domestik semata.

Analisis Strategi TANs Tenaganita

Dengan mengacu pada kerangka Keck dan Sikkink, strategi advokasi Tenaganita dianalisis melalui empat instrumen politik yang tidak beroperasi secara linier dan terpisah, melainkan terintegrasi menjadi satu rangkaian operasi kampanye yang saling memperkuat. Pertama, politik informasi menjadi fondasi seluruh strategi. Tenaganita menjalankan fungsi ini secara eksklusif karena memiliki akses akar rumput yang tidak dimiliki LSM internasional, dengan menyusun kesaksian terdokumentasi mengenai penahanan paspor, biaya perekrutan yang mencekik, dan kondisi barak yang buruk. Data mentah ini disalurkan kepada Liberty Shared, yang menerjemahkannya menjadi petisi yang memenuhi standar

pembuktian. Transfer data inilah titik kritis lemparan bumerang pertama (Keck & Sikkink, 1998; Tenaganita, 2022).

Kedua, politik simbolis. Tenaganita secara konsisten membangun narasi “kelapa sawit yang diproduksi dengan kerja paksa”, mengaitkan produk konsumen sehari-hari dengan eksploitasi manusia dan dengan demikian menggeser persepsi publik dari isu lingkungan menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Liputan media investigatif menjalankan strategi naming-and-shaming dengan mengaitkan eksploitasi perkebunan dengan keuntungan merek global, yang diperkuat oleh laporan hak asasi manusia yang menonjolkan simbol-simbol moral pelanggaran (Amnesty International, 2021; Satri, 2021).

Ketiga, politik leverage. Jaringan Tenaganita–Liberty Shared secara strategis memilih Amerika Serikat sebagai titik tekan utamanya karena kekuatan pasarnya yang tak tertandingi. Melalui petisi kepada CBP, tekanan moral dikonversi menjadi instrumen hukum dengan daya paksa finansial, yaitu WRO berdasarkan Section 307. Efektivitasnya tampak dari dua eskalasi: penerbitan WRO pada Desember 2020 dan peningkatan menjadi Notice of Finding pada Januari 2022, yang memperbolehkan penyitaan kargo bernilai jutaan dolar. Leverage ini meluas melampaui Sime Darby, karena CBP juga menerbitkan WRO terhadap Top Glove dan FGV Holdings, sehingga menciptakan efek jera di seluruh industri (CBP, 2025; Nissen, 2022).

Keempat, politik akuntabilitas. Kontradiksi antara klaim Sime Darby sebagai produsen CSPO terbesar di dunia dan bukti sistematis kerja paksa menjadi senjata utama yang tidak dapat ditoleransi oleh pembeli, investor, dan regulator. Akuntabilitas terwujud secara bertahap: gugatan SLAPP yang gagal mempercepat mundurnya para penasihat hak asasi manusia dari komite perusahaan, Notice of Finding memaksa penunjukan auditor independen, dan realisasi remediasi perekrutan sekitar RM82 juta menjadi

bentuk akuntabilitas material yang paling konkret. Pencabutan WRO pada Februari 2023 karena itu bukanlah kemenangan bagi Sime Darby, melainkan bukti akuntabilitas yang berhasil dipaksakan (CBP, 2025; Tenaganita, 2022).

Secara teoretis, keberhasilan ini menegaskan argumen sentral TANs bahwa aktor masyarakat sipil dapat memengaruhi politik global melalui mobilisasi norma dan informasi, bukan melalui kekuatan material. Kasus Sime Darby menggambarkan rangkaian lengkap pola bumerang: dari kebuntuan domestik, ke kemitraan transnasional, ke aktivasi institusi negara pengimpor, dan akhirnya ke perubahan terukur dalam perilaku korporasi (Jegade, 2024; Keck & Sikkink, 1998).

Para sarjana yang mengingatkan agar tidak terlalu optimistis terhadap difusi norma mencatat bahwa remediasi yang dicapai di bawah tekanan eksternal dapat menjadi rapuh begitu sorotan memudar, dan bahwa instrumen berbasis pasar dapat menggeser pelanggaran ke pemasok yang kurang terlihat alih-alih menghapusnya. Pengembalian biaya perekrutan, walau substansial, lebih banyak menjawab kerugian masa lalu daripada pendorong struktural eksploitasi tenaga kerja di sektor kelapa sawit. Penilaian kritis karena itu memperlakukan hasil Sime Darby sebagai kemenangan yang signifikan tetapi bersyarat, menunjukkan potensi advokasi transnasional sekaligus menegaskan perlunya pemantauan berkelanjutan untuk mencegah kemunduran (Edelman, 2001; Scholte, 2004).

SIMPULAN

Studi ini menarik tiga simpulan utama. Pertama, kondisi kerja paksa yang dialami pekerja migran di perkebunan Sime Darby Plantation pada 2020–2023 terbukti bersifat sistemik dan memenuhi seluruh sebelas indikator kerja paksa ILO, termasuk jeratan utang, penahanan paspor, penipuan tentang kondisi kerja,

dan hunian yang buruk. Situasi paradoks pada produsen CSPO terbesar di dunia ini menegaskan kegagalan ganda penegakan hukum domestik Malaysia dan skema sertifikasi sukarela RSPO.

Kedua, strategi advokasi Tenaganita dalam kerangka TANs beroperasi melalui integrasi empat instrumen politik yang saling memperkuat. Politik informasi menyediakan fondasi empiris, politik simbolis membingkai isu teknis menjadi narasi moral global, politik leverage mengonversi tekanan moral menjadi sanksi yang memaksa secara finansial melalui pasar Amerika Serikat, dan politik akuntabilitas memaksa korporasi memikul tanggung jawab material melalui remediasi lebih dari RM82 juta kepada lebih dari 34.000 pekerja.

Ketiga, pola bumerang terbukti menjadi jalur advokasi yang efektif ketika saluran domestik tersumbat. Hal ini menegaskan proposisi studi bahwa semakin kuat integrasi keempat strategi TANs dalam memobilisasi tekanan eksternal melalui jaringan transnasional, semakin besar pula peluang diterbitkannya sanksi perdagangan sebagai instrumen penegakan hak asasi manusia lintas batas. Studi ini merekomendasikan penguatan perlindungan diplomatik pekerja migran oleh pemerintah Indonesia, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam memproduksi dokumentasi berstandar pembuktian, serta penelitian komparatif dan longitudinal lanjutan mengenai dampak remediasi setelah pencabutan sanksi.

Selain temuan empirisnya, studi ini memiliki implikasi praktis bagi organisasi masyarakat sipil yang beroperasi dalam konteks impunitas domestik. Studi ini menunjukkan bahwa LSM lokal dapat melipatgandakan pengaruhnya dengan menjalin kemitraan dengan sekutu transnasional yang memiliki keahlian teknis, dengan membingkai keluhan dalam bahasa standar yang diakui secara internasional seperti indikator ILO, dan dengan mengidentifikasi forum

penegakankhususnya mekanisme berbasis perdagangantempat aktor target benar-benar rentan terhadap tekanan. Bagi para pembuat kebijakan, kasus ini menegaskan semakin pentingnya uji tuntas rantai pasok dan rezim pengendalian impor sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja yang bekerja jauh melampaui batas negara. Penelitian mendatang dapat secara produktif membandingkan pengalaman Sime Darby dengan kampanye Withhold Release Order serupa terhadap produsen Malaysia lain, seperti Top Glove dan FGV Holdings, guna mengidentifikasi kondisi yang membuat advokasi transnasional menghasilkan perbaikan kesejahteraan pekerja yang langgeng alih-alih konsesi sementara yang didorong reputasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. R., Muhili, M. S. M., Ganama, M., Adi, M. N. M., & Angsor, M. a. M. (2023). Assessing forced labor and standards in Malaysian palm oil industry. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(6), e002363. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i6.2363>
- Amnesty International. (2021). Skandal besar minyak kelapa sawit: Pelanggaran ketenagakerjaan di belakang nama-nama merek besar. Amnesty International Ltd. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>
- Anwar, L. M. (2025). Strategi Transnational Advocacy Networks (TANs) dalam advokasi kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Universitas Lampung.
- Brad, A., & Hein, J. (2022). Towards transnational agrarian conflicts? Global NGOs, transnational agrobusiness and local struggles for land on Sumatra. *New Political Economy*, 28(3), 452–467. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2138300>
- Burchill, S., Paterson, M., Reus-Smit, C., Linklater, A., Devetak, R., True, J., & Donnelly, J. (2005). *Theories of international relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- CBP. (2025). Withhold Release Orders and findings dashboard. U.S. Customs and Border Protection. <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/withhold-release-orders-findings-dashboard>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- Deli, M. M., Asha'ari, M. J., Rauf, U. a. A., Jamil, A. H., Abdullah, S. I. N. W., Harun, S. N., & Purwati, A. A. (2023). Issues of human resource in Malaysian palm oil industry. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12(3). <https://doi.org/10.6007/ijarped.v12-i3/18995>
- Edelman, M. (2001). Social movements: Changing paradigms and forms of politics. *Annual Review of Anthropology*, 30(1), 285–317. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthr.30.1.285>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2020, 5 Maret). Kinerja industri sawit Indonesia. <https://gapki.id/kinerja-industri-sawit-indonesia/>
- International Labour Office. (2022). *Forced Labour Convention, 1930* (No. 29). International Labour Organization.
- IPO News. (2023, 18 Juli). Sime Darby Group: Have oil palm plantations in four countries. *Indonesian Palm Oil News*. <https://indonesianpalmoilnews.com/sime-darby-group-have-oil-palm-plantations-in-four-countries/>
- Jegede, F. (2024). Global issues: The rise of non-state actors in the 20th and 21st century. *Atlas of Today's World*.

- <https://www.atlasoftodayworld.org/articles-global-issues/the-rise-of-non-state-actors-in-the-20th-and-21st-century>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Lumempouw, G. J. (2024). Sustainability in global trade: Integrating principles for inclusive and resilient systems. *Asian Journal of Logistics Management*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.14710/ajlm.2024.22794>
- Nissen, A. (2022). Import bans on products from forced labor in the Trump era. *University of Bologna Law Review*, 6, 367–382. <https://doi.org/10.6092/issn.2531-6133/14495>
- Saturi, S., & Saturi, S. (2021, 22 Oktober). Jejak sawit gelap di pasar global. [Mongabay.co.id. https://mongabay.co.id/2021/10/20/jejak-sawit-gelap-di-pasar-global/](https://mongabay.co.id/2021/10/20/jejak-sawit-gelap-di-pasar-global/)
- Scholte, J. A. (2004). *Global civil society: Changing the world?* (CSGR Working Paper No. 31/99). https://wrap.warwick.ac.uk/2094/1/WRAP_Scholte_wp3199.pdf
- Setiawan, K., Gunawan, S., Setyawan, H., & Hartono. (2022). 1998–2018: Analysis of Indonesian and Malaysian people's palm oil plantations. *Tropical Plantation Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.22013/tpj.v1i1.2>
- Somiah, V., Hashim, H., Annuar, A. M. K., & Hanip, F. I. (2025). Everyday precarities and systemic exploitations: Indonesian migrant workers in Sarawak's palm oil industry. *International Journal of Business and Society*, 26(2), 407–424. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8457.2025>
- Tenaganita. (2022, 5 Maret). Bigger concerns for palm oil. [Tenaganita. https://tenaganita.net/bigger-concerns-for-palm-oil/](https://tenaganita.net/bigger-concerns-for-palm-oil/)
- Theys, S. (2017, 29 Desember). *International relations theory*. E-International Relations. <http://www.e-ir.info/2017/11/30/beginners-textbook-international-relations-theory/>
- USDA. (2023). Indonesia palm oil: Historical revisions using satellite-derived methodology. United States Department of Agriculture. <https://ipad.fas.usda.gov/highlights/2023/11/Indonesia/index.pdf>
- Walhi. (2024, 8 November). Surat publik dari lebih dari 30 organisasi menyoroti pelanggaran lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan tata kelola yang dilakukan AAL dan menuntut RSPO karena melakukan tindakan greenwashing pada perusahaan kelapa sawit yang berkonflik. [WALHI. https://www.walhi.or.id/](https://www.walhi.or.id/)
- Wicaksana, I. G. W. (2016). *Teori hubungan internasional* (V. Dugis, Ed.). Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Wong, A. (2025, 19 April). The hidden workforce: Exploiting undocumented migrants in Malaysian plantations. *Synergy: The Journal of Contemporary Asian Studies*. <https://utsynergyjournal.org/2025/04/19/the-hidden-workforce-exploiting-undocumented-migrants-in-malaysian-plantations/>
- WWF. (2024). *WWF-Indonesia encourages the use of sustainable palm oil products in family life*. <https://www.wwf.id/en/blog/wwf-indonesia-encourages-use-sustainable-palm-oil-products-family-life>